

BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 883/II/X/2015



KONFERENSI GOPAC HASILKAN DEKLARASI YOGYAKARTA



**PEMROV HARUS
SERIUS TANGANI
KASUS KEKERASAN
ANAK**



**KOMISI X DUKUNG
KAWASAN MANDEH
JADI PARIWISATA
NASIONAL**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



KONFERENSI GOPAC HASILKAN DEKLARASI YOGYAKARTA



Ketua DPR RI Setya Novanto memukul gong pembukaan Konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta

Konferensi ke-6 GOPAC (Global Organization for Parliamentarians Against Corruption) telah menghasilkan Deklarasi Yogyakarta, yang berisikan dua puluh (20) butir deklarasi yang berasal dari inti sari enam sesi panel serta empat sesi dengan mitra GOPAC yang mencerminkan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh anggota parlemen dalam pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon dalam konferensi pers yang diselenggarakan usai penutupan sidang, Kamis (8/10) di Yogyakarta.

Konferensi GOPAC yang berlangsung dari tanggal 6 - 8 Oktober ini mengambil tema "Bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity".

Sidang GOPAC kali ini menitikberatkan isu korupsi besar (grand corruption) dan memiliki visi untuk membawa kasus korupsi skala besar ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC)," kata Fadli.

Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari 74 negara yang terdiri dari para Pimpinan/Anggota Parlemen, para praktisi, akademisi, dan LSM.

Dalam deklarasi tersebut para peserta antara lain menyatakan dukungan dan solidaritasnya terhadap tujuan ke-16 dari SDGs terkait dengan pemerintahan dan korupsi. Deklarasi juga meminta negara-negara yang belum meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) untuk meratifikasinya.

Selain itu, deklarasi juga merekomendasikan kepada PBB untuk mempertim-

bangkan adanya sebuah Protokol UNCAC baru dalam rangka membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili kasus korupsi skala besar. Lebih lanjut deklarasi mendukung negara-negara untuk melaksanakan praktik-praktik inovatif guna memitigasi tindak korupsi dalam kegiatan kampanye politik.

Beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan pada saat konferensi ini adalah *launching* kerja sama GOPAC dengan IDB untuk peningkatan peran parlemen untuk pengawasan terhadap dana asing khususnya terkait dengan komitmen internasional

mengenai SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) yang juga baru disepakati pada September tahun ini.

Konferensi ini tidak hanya diikuti oleh Anggota Parlemen, tetapi juga diwarnai dengan kehadiran tokoh, akademisi, dan praktisi yang berkecimpung di dunia hukum dan pemberantasan korupsi dari dalam dan luar negeri.

Berbagai kegiatan selama konferensi ini semakin mengukuhkan keinginan DPR terus meningkatkan kerja sama internasional, melengkapi diri untuk lebih memahami permasalahan, dan menjadikan instrumen hukum internasional sebagai bagian dari dasar pencapaian cita-cita melawan korupsi, terutama mega korupsi atau yang dalam konferensi ini disebut *grand corruption*. (TT)

FOTO: ANDI/PARLE/RAY

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.I.P. M.H. (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung

Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen;

Sofyan Effendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

FADLI ZON TERPILIH MENJADI KETUA GOPAC



Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, terpilih menjadi Ketua GOPAC (Global Organization for Parliamentarians Against Corruption). Terpilihnya Fadli Zon ini disetujui secara aklamasi dalam penutupan Konferensi GOPAC, Kamis (8/10) di Yogyakarta.

Sebelumnya Fadli Zon merupakan kandidat tunggal dari SEAPAC (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption) yang bersaing dengan kandidat dari regional lainnya yaitu John Hyde, politisi senior dari Australia dan juga Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana.

Fadli terpilih sebagai Ketua GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America.

Selain Fadli sebagai Ketua GOPAC, susunan kepengurusan lainnya adalah, Wakil Ketua GOPAC Paula Berto dari Amerika Latin dan Osei Kyei-Mensah-Bonsu dari Ghana. Sekretaris GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan bendaharanya dari Karibia.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, terpilihnya sebagai Ketua GOPAC merupakan tugas berat yang diamanahkan oleh GOPAC.

Dia sebagai orang pertama Indonesia yang menjabat sebagai Ketua GOPAC.

“Saya melihat ini adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi internasional GOPAC yang sudah cukup bagus, standingnya di dunia internasional dan kesempatan pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan standing position dalam pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Fadli.

Selain itu, dengan jabatan ini, dirinya juga mendorong anggota DPR RI untuk lebih berkiper di dunia internasional.

“Sudah disepakati ini kerja bersama dan kami akan buat kantor perwakilan GOPAC di DPR sehingga jadi standing encourage bagi anggota DPR RI untuk lebih banyak masuk ke GOPAC,” kata Fadli Zon.

Untuk bisa menjadi calon Ketua GOPAC, terlebih dulu seseorang harus dicalonkan di negaranya sendiri atau nasional chapter, kemudian ke regional chapter. Pengusulan itu harus ditandatangani oleh masing-masing regional chapter seluruh benua dan minimal ditandatangani oleh 3 negara sebagai syarat dukungan pencalonan. (TT), FOTO : ANDI/PARLE/RAY

DPR Dukung GOPAC Kaji Peradilan Internasional Bagi *Grand Corruption*

Grand Corruption atau korupsi kakap adalah kejahatan yang tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar tetapi juga melibatkan para pengambil kebijakan. Korupsi kakap telah merampas hak asasi manusia seperti hak untuk kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama.

Organisasi anggota parlemen global yang menyatakan perang terhadap korupsi – GOPAC pada konferensi kelima tahun 2013 telah bersepakat ingin memperluas penerapan instrumen hukum internasional sehingga dapat memberikan kewajiban bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam upaya perlawanan terhadap korupsi.

“Sebagai bagian dari GOPAC, Indonesia yang telah membentuk GOPAC Indonesian Chapter pada tahun 2012 dan bergabung dengan SEAPAC memiliki ketertarikan kuat untuk mendorong agar pelaku grand corruption dapat diadili secara universal,” kata Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam sambutannya saat membuka secara resmi Sidang Umum GOPAC keenam di Yogyakarta, Selasa (6/10/15).

Ia menyebut data fantastis dari Bank Dunia, aliran dana keluar negeri dari aktivitas kriminal, seperti korupsi dan pengemplangan pajak diperkirakan senilai 1-1,5 triliun dolar AS pertahun. Separuhnya berasal dari negara berkembang dan negara yang berada dalam masa transisi.

Sementara dana untuk pencapaian program pasca-2015, SDGs (Sustainable Development Goals) diperlukan hanya 135 miliar dollar AS. Jika hasil dari grand corruption dikonversikan pada biaya pencapaian SDGs maka dunia memiliki sumber dana yang luar biasa untuk menciptakan tempat tinggal yang lebih baik bagi manusia.

“Kita berharap, GOPAC dapat menjadi pemain kunci untuk mendorong perlawanan terhadap *grand corruption*, menjadi mitra kerja sama internasional untuk mendorong terciptanya mekanisme internasional untuk mengadili para pelaku *grand corruption*. GOPAC harus mampu untuk melumpuhkan impunitas, agar hukum tegak tidak pandang bulu (equality before the law),” tegas Ketua DPR.

Korupsi menurutnya bukan hanya permasalahan moral tetapi juga merupakan hambatan serius bagi upaya pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, terbatasnya akses pada kesehatan dan pendidikan, serta upaya-upaya yang ingin diraih pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam Sidang Umum di Yogyakarta, anggota

GOPAC diharapkan bisa duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang efektif sebagai upaya pemberantasan korupsi, khususnya *grand corruption* dimana langkah tersebut bertujuan untuk mengkategorikan *grand corruption* sebagai kejahatan internasional sehingga memungkinkan lembaga internasional untuk menangkap, mengadili, menyidangkan dan menghukum para pelakunya.

Agenda pertemuan dijadwalkan akan berlangsung 5-8 Oktober, diikuti delegasi dari 74 negara, 4 ketua parlemen, 5 wakil ketua parlemen dan kurang lebih 250 peserta yang terdiri dari



Ketua DPR RI Setya Novanto

anggota dan observer. Peserta akan berdebat dan berdiskusi melalui enam panel yang secara luas akan berbicara tentang isu-isu Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), *grand corruption*, pemulihan aset, peningkatan partisipasi perempuan dalam isu-isu non-tradisional, hingga berbicara mengenai demokrasi biaya tinggi.

“Semoga konferensi kali ini dapat menghasilkan sebuah deklarasi yang dapat mendukung pencapaian-pencapaian misi GOPAC di masa mendatang dan menjadi landasan besar dalam gerakan perlawanan terhadap korupsi,” demikian Setya Novanto. (IKY) FOTO:

ANDI/PARLE

INDONESIA KEMBANGKAN SISTEM ANTI KORUPSI YANG KUAT



Pimpinan DPR RI, Ketua BKSAP, Menkopolkam dan Ketua BPK pada pembukaan Konferensi GOPAC

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilihat secara komprehensif. GOPAC Indonesia telah bekerja untuk mempromosikan pengembangan sistem anti-korupsi yang kuat, mulai dari promosi pemerintahan yang baik, pendirian nilai-nilai etika, deteksi dini korupsi hingga penguatan penegak hukum.

Demikian pidato yang disampaikan Fadli Zon pada pembukaan Konferensi Global Parliamenteriary Against Corruption (GOPAC) ke-6 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin (6/10).

Fadli yang juga Ketua GOPAC Indonesia mengatakan, Sidang GOPAC perlu mencari strategi konkret untuk meng-

kriminalisasi korupsi besar. Pada konferensi GOPAC terakhir di tahun 2013 telah disepakati untuk mengejar pelaku korupsi besar dalam konteks yurisdiksi ekstrateritorial.

“Banyak strategi telah ditetapkan dan dalam beberapa hari mendatang kita akan membahas strategi-strategi dalam serangkaian diskusi panel,” kata Fadli.

Korupsi, kata [Fadli, telah sering menjadi produk dari kekuasaan. Mereka yang memegang kekuasaan, khususnya mereka yang memilikinya tanpa batasan, cenderung korup. Belajar dari sejarah, Indonesia membuka jalan melawan korupsi dalam arti yang lebih

luas. Hari ini, konstitusi telah menetapkan batas bagi mereka yang memegang kekuasaan.

Seperti, Presiden tidak dapat dipilih lebih dari dua kali dan Parlemen sebagai kekuatan legislasi dipegang oleh DPR. Cabang peradilan independen bebas dari intervensi apapun, sementara lembaga audit akan melakukan audit untuk semua lembaga negara tanpa pengecualian.

Fadli menambahkan, sebagai negara yang concern memerangi korupsi, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan kekuatan besar untuk menyelidiki, menuntut dan membawa koruptor ke pengadilan. “Tidak ada yang memiliki kekebalan hukum, pejabat negara dari menteri, anggota parlemen, hakim konstitusi, gubernur, bupati dan walikota tidak ada pengecualian,” kata Fadli.

Ditambahkannya, ada hal penting lainnya mengukur pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih komprehensif, seperti bagaimana mencegah terjadinya korupsi.

Menurutnya, korupsi tidak hanya diukur dari mereka yang ditangkap, meskipun membawa mereka ke pengadilan adalah cara mengkriminalisasikan koruptor.

Menurut Fadli, banyak sumber keuangan negara yang dapat diselamatkan jika kita membangun sistem pencegahan melalui pengembangan sistem anti-korupsi yang kuat. (TT)

FOTO:RY/PARLE/RAY

Sidang GOPAC Diharap Beri Kontribusi Gerakan Anti Korupsi Internasional

Konferensi Global Parliamentary Against Corruption (GOPAC) ke-6 yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 6 - 8 Oktober 2015 diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan internasional terhadap gerakan anti-korupsi.

Demikian disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf saat menyampaikan pidatonya pada pembukaan Sidang GOPAC, Selasa (6/10) di Hotel Ambarukmo.

Nurhayati menyampaikan, pertemuan anggota parlemen seperti GOPAC ini sangat penting dan menguntungkan dalam gerakan global melawan korupsi. Indonesia yang menjadi tuan rumah kali ini, akan melakukan upaya maksimal agar konferensi ini dapat berjalan dengan sukses.

"Momentum ini sekaligus menunjukkan keseriusan Bangsa Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Nurhayati.

Konferensi GOPAC kali ini mengambil tema: "*Bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizen can live in pros-*

perity and equity". Atas dasar tema tersebut, diharapkan adanya perlakuan yang sama di depan hukum terhadap seluruh pelaku korupsi besar dan harus menjadi *concern* bersama, agar masa depan penegak hukum menjadi sejalan dengan masa depan kehidupan umat manusia yang berhak atas kehidupan yang lebih baik

Konferensi yang dihadiri oleh 72 negara dan 250 anggota ini, menjadi sarana yang penting untuk bertukar gagasan mengenai pencegahan dan penanggulangan masalah korupsi.

"Indonesia dalam GOPAC mengusulkan tema tentang "High Cost of Institutionizing Democracy". Tema tersebut membahas mengenai mahalnnya harga dari sebuah sistem demokrasi yang sarat menimbulkan korupsi dan ini harus diperbaiki. Misalnya, proses Pilkada yang banyak diwarnai oleh *money politic*," ungkap politisi asal Dapil Jawa Timur itu.

Nurhayati menambahkan, sebelum konferensi ini berlangsung, DPR telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) guna mencari masukan dari para ahli untuk memberikan wawasan yang



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

komprehensif. Selain itu, mengundang duta besar negara sahabat untuk memastikan partisipasi anggota parlemen mereka dalam konferensi ini. (TT)

FOTO:RY/PARLE/RAY

BPK TEMUKAN LEBIH DARI 15 RIBU PERMASALAHAN



Pimpinan DPR menerima Laporan IHPS I dari Ketua BPK

Badan Pemeriksa Keuangan, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2015, menyebutkan, BPK menemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434

permasalahan. Permasalahan itu meliputi 7.890 (51,12 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 7.544 (48,88 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Demikian disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, di depan Rapat Paripurna DPR, Senin (5/09/15). Dalam kesempatan itu, Harry didampingi beberapa pejabat BPK. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.609 permasalahan berdampak pada pemulihan keuangan negara, daerah, perusahaan, atau berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun," jelas Harry.

Harry melanjutkan, permasalahan berdampak finansial tersebut terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian Rp 2,26 triliun, potensi kerugian Rp 11,51 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 7,85 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan

penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara, daerah, perusahaan senilai Rp 396,67 miliar.

“Selain itu, terdapat 3.137 permasalahan penyimpangan administrasi serta 144 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 11,84 triliun,” jelas Mantan Anggota DPR periode 2009-2014 itu.

Harry menjelaskan, IHPS I memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, yang terdiri atas, 117 objek pada Pemerintah Pusat (17,57 persen), 518 objek Pemerintah Daerah dan BUMD (77,78 persen), serta 31 objek BUMN dan badan lainnya (4,65

persen).

Sementara untuk jenis pemeriksaannya, terdiri dari 607 objek pemeriksaan keuangan (91,14 persen), 5 pemeriksaan kinerja (0,75 persen), dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (8,11 persen).

“Dengan demikian, pemeriksaan BPK lebih banyak dilakukan untuk pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” imbuh Harry. Usai membacakan laporannya, Harry menyerahkan dokumen IHPS I kepada Pimpinan DPR. (SFI/FOTO: ANDRI/PARLE/IW.

PARIPURNA DPR SETUJU BENTUK PANSUS PELINDO II

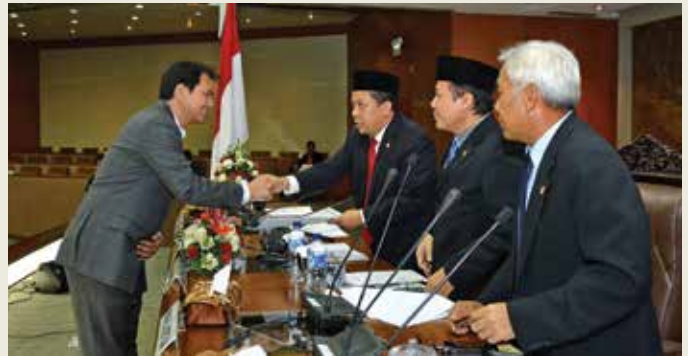
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, di Gedung DPR, Senin (5/10). Peretujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan usulan pembentukan Pansus yang terdiri lintas fraksi dan lintas komisi yang secara khusus akan mendalami dan mengungkap persoalan-persoalan yang terjadi di Pelindo II.

Menurut Aziz, Pansus bermaksud untuk mengetahui praktek-praktek pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan Pelindo II dan mengawasi proses penegakan hukumnya serta memastikan agar kasus tersebut dapat diusut secara tuntas dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pansus dimaksudkan untuk menganalisa, mengevaluasi, mengoreksi dan selanjutnya merumuskan kebijakan untuk mengupayakan solusi terhadap persoalan yang terjadi di Pelindo II.

Pada akhirnya Pansus akan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak yang dianggap berkepentingan langsung dengan Pelindo II termasuk Polri dalam rangka pengungkapan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Pelindo II.

Ditambahkan, penggeledahan Gedung IPC Pelindo II



Pimpinan DPR menerima Laporan Ketua Komisi III

di pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh belasan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri menunjukkan bahwa persoalan ini belum selesai. Penggeledahan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 10 mobil crane yang dilakukan tahun 2013 ditengarai menimbulkan kerugian negara yang cukup signifikan.

Berbagai pemberitaan terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim serta berbagai spekulasi terhadap dugaan korupsi di Pelindo II bermunculan dari berbagai kalangan. Di satu sisi ini menambah rentetan persoalan hukum yang terjadi di negeri ini, namun di sisi lain proses penegakan hukum seakan berjalan tanpa pandang bulu.

“Dengan menelaah persoalan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan persoalan serius untuk segera diatasi. Maka Komisi III DPR memandang perlu untuk membentuk Pansus Pelindo II,” ungkap Aziz menambahkan. (SPY,MPI)/ FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

KETUA DPR LANTIK TIGA ANGGOTA PAW



Pelantikan tiga Anggota DPR PAW

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil-wakil Ketua Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah di depan Sidang Paripurna Senin (5/10) memandu pelantikan

dan pengambilan sumpah tiga anggota DPR pengganti antar waktu (PAW).

Ketiga anggota tersebut adalah, Venny Devianti menggantikan Eldie Suwandhie dan Noor Achmad menggantikan Nusrion Wahid dari Partai Golkar. Keduanya dilantik berdasarkan Keppres N0.97/P Tahun 2015 tanggal 8 September 2015.

Seorang anggota lagi Rahmat Nasution Hamka menggantikan Willy M. Yoseph dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dilantik berdasarkan Keppres No.104/P Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Ketua DPR atas nama Pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan selamat atas pelantikan ketiga anggota Dewan tersebut dan berharap untuk segera bergabung dengan para anggota Dewan lainnya guna melaksanakan tugas-tugas ke depan yang cukup padat. (MPI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

Pimpinan DPR membeberkan refleksi perjalanan 1 Tahun RPR RI Periode 2014-2019, agar eksistensi DPR dapat menjadi catatan bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi Indonesia. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Demokrasi Indonesia merupakan Demokrasi yang masih muda.

“Perlunya kita memandang DPR sebagai harapan bagi keberlangsungan proses demokrasi yaitu proses daulat rakyat,” kata Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (2/10)

Menurutnya, dalam demokrasi rakyat mendapatkan tempat yang besar di dalam cabang kekuasaan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, dan berbuat bersama Pemerintah membuat undang-undang dan anggaran yang aspiratif berdasar kepada kepentingan rakyat banyak.

Fahri menekankan 1 tahun kinerja DPR dapat dilihat dari sistem kelembagaan baru yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3, yang memandang bahwa selama ini DPR sebagai lembaga pengawas tidak memiliki alat yang mumpuni untuk mengimbangi sistem kerja Pemerintah yang memiliki sistem pendukung birokrasi dan berbagai lembaga tinggi negara.

Sementara itu, DPR datang silih berganti yang datang dari berbagai ragam basis kelompok dan golongan, bukan sebagai orang yang pintar namun sebagai wakil yang paling disukai dan dipilih oleh rakyat di daerah pemilihannya.

Untuk itu, negara berkepentingan untuk memberikan *supporting system* yang bertugas sebagai dapur pemikiran bagi



Pimpinan DPR, Ketua BKSAP dan Sekjen DPR saat memberikan keterangan pers

anggota Dewan agar tugas-tugas pengawasan, penganggaran dan legislasi dapat seimbang dengan kekuasaan pendukung yang dimiliki oleh eksekutif sebagai kendali dari proses bernegara.

“UU MD3 mengamanatkan salah satunya yaitu terbentuknya Badan Keahlian DPR sebagai *supporting system* bagi DPR,” tegasnya. (AS) FOTO:DENUS/PARLE/RAY

KOMUNITAS BADMINTON DPR, LUAR BIASA



Ketua DPR Setya Novanto dan Anggota PDI Perjuangan Aria Bima pada pembukaan turnamen badminton Piala Pimpinan DPR

Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta adalah tempat dimana isu politik dan anggaran tingkat nasional dibicarakan, diperdebatkan. Media sangat sering menyoroti betapa sengitnya perbedaan pandangan diantara fraksi, tetapi siapa sangka di salah satu sudut kompleks ini semua perbedaan menjadi cair.

“Komunitas badminton kita di sini luar biasa. Disini bergabung Anggota DPR, karyawan setjen, tenaga ahli, aspri, kita rutin bertemu di sini setiap hari. Dulu di GOR ini ada perbedaan fraksi, lama-lama tidak ada, semua gabung saja. Ada yang motifnya ingin sehat, rekreasi, kalau politisi ya kita lobi di sini,” kata anggota Komisi VI Aria Bima di GOR Bad-

minton DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/15).

Politisi Fraksi PDIP ini menyampaikan hal tersebut bagian dari laporannya sebagai Ketua Panitia Turnamen Badminton Piala Pimpinan DPR dalam rangka HUT RI dan HUT DPR yang ke-70. Ia menyebut standar lapangan yang sudah bertaraf internasional membuat banyak pihak betah berlatih.

“Saya sudah mengajak pemain nasional untuk berlatih di sini, mereka mengakui lapangan kita sudah sesuai standar internasional, pencahayaannya juga baik,” tutur dia. Ia kemudian dengan lancar menyebut anggota DPR yang aktif berlatih, termasuk yang terpaksa berhenti dulu latihan karena cedera. “Kita kalau semangat bertanding, kadang lupa umur,” katanya disambut tawa hadirin.

Ketua DPR Setya Novanto menyambut baik pelaksanaan turnamen yang melibatkan sejumlah pihak yang bekerja di gedung parlemen. Ia meyakini dengan olah raga badminton bisa membentuk badan dan jiwa menjadi sehat dan kuat. Namun lebih jauh kegiatan seperti ini bisa menjadi sarana berbagi ide dan lobi.

“Lobi itu seni membuat keputusan sulit menjadi mudah, dalam olahraga golf sudah biasa, di sini di lapangan badminton tentu juga bisa,” ujar dia. Politisi Fraksi Partai Golkar ini kemudian menyerahkan Piala Pimpinan DPR kepada panitia pelaksana. “Siapapun yang menang kedepankan sportivitas.”

(IKY) FOTO:DENUS/PARLE/RAY

Ketua DPR Gelar Pertemuan Bilateral Dengan Zimbabwe dan Sudan



Pertemuan Bilateral Ketua DPR dengan Ketua Parlemen Zimbabwe

Di sela-sela Konferensi Global Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) ke-6, Ketua DPR RI Setya Novanto, melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Zimbabwe, Jacob Francis Mudenda, dan Ketua Parlemen Sudan yang diwakili Aisha Ahmed Mohamed Salah.

Dalam pertemuan dengan parlemen Zimbabwe, keduanya membahas berbagai masalah, baik bidang parlemen dan juga pemerintahan.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ketua Parlemen Zimbabwe untuk hadir dalam acara GOPAC ini dan juga terima kasih atas pertemuan bilateral ini semoga menjadi kekuatan bagi hubungan kedua negara,” kata Novanto dalam pertemuan tersebut di Yogyakarta, Selasa (6/10/15).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu membahas mengenai perdagangan, UKM. “Tadi juga sempat dibahas mengenai masalah daging sapi. Zimbabwe berharap bisa mengekspor sapi-sapi mereka ke Indonesia. Saya katakan kepada Jacob bahwa Indonesia memiliki kebutuhan yang besar terhadap daging sapi. Kita akan bicarakan kepada Kementerian Perdagangan soal kemungkinan kerjasama impor sapi dari Zimbabwe,” kata Novanto.

Di bidang pariwisata, kedua Ketua Parlemen itu sepakat untuk ditindaklanjuti dan akan menyampaikan ke pemerintah

masing-masing.

Sementara itu, pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Sudan, Aisha, Novanto menyatakan, sidang GOPAC ini memberikan arti penting mengingat forum ini juga membicarakan pemberantasan korupsi.

Kedua Pimpinan membicarakan masalah revisi UU KPK Sudan, yang saat ini tengah mereka bahas. Sudan berharap Parlemen Indonesia dapat memberikan masukan-masukan terkait RUU KPK yang sedang dibahas. Tentunya hal ini akan kita sampaikan kepada Komisi III DPR agar dapat memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi Sudan,” imbuh Novanto.

Hal lain yang menjadi pembicaraan penting dalam pertemuan dengan Sudan adalah hubungan kerjasama Indonesia dengan Sudan. Selama ini Indonesia dan Sudan sudah melakukan kerjasama yang luar biasa. Seperti kerjasama di bidang pertanian. Sudan telah melakukan penanaman dan pengiriman benih padi di Indonesia dan ternyata sangat berhasil dan tidak menyangka hasilnya jauh lebih baik dari Sudan.

Selain pertanian, kerjasama lainnya yang dibahas adalah energi. Sudan merupakan salah satu negara penghasil gas terbesar. Kerjasama ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap perdagangan di Indonesia.

Indonesia secara konsisten terus memberikan dukungan politik bagi Sudan. Indonesia berpartisipasi dalam upaya membangun perdamaian di Sudan melalui pengiriman misi PBB yaitu UNMIS yang beroperasi di Sudan Selatan dan UNAMID di Darfur. Indonesia mengirimkan 1.000 personel setiap tahunnya untuk membantu masalah keamanan dan teknis-teknis pelatihan.

Sudan, kata politisi Partai Golkar itu juga meminta bantuan kepada Indonesia agar mendukung Sudan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika.

“Sudan minta agar Indonesia mendukung Sudan menjadi tuan rumah KAA. Tentu Indonesia sangat mendukung. Mudah-mudahan hubungan Indonesia-Sudan baik hubungan parlemen dan pemerintah berjalan baik,” ungkap Novanto. (TT)

FOTO:RY/PARLE/RAY



Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI Bowo Sidik Pangarso dan Arzeti Bilbina

Pemprov Harus Serius Tangani Kasus Kekerasan Anak

Rona kekecewaan terlihat pada Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, saat mereka menggelar pertemuan dengan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan jajaran SKPD. Hal tersebut dipicu ketidakhadiran Gubernur maupun Sekretaris Daerah, namun hanya diwakili Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi.

“Kami cukup kecewa, sebab para pengambil kebijakan yang seharusnya membahas persoalan yang krusial yakni Gubernur atau Sekda tidak ada,” sergah Bowo Sidik Pangarso, Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, di sela-sela

acara pertemuan sebelum sesi tanya jawab dibuka.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai ketidakhadiran pejabat pengambil keputusan bisa diartikan bahwa Pemprov Kepri masih menganggap masalah perlindungan anak sebagai hal biasa. Padahal faktanya di Kepri kasus-kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi, sehingga membutuhkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.

“Kami dari Komisi VIII DPR siap mendorong Pemprov Kepri agar masalah daerah yang berhubungan dengan sosial dan perlindungan anak memperoleh anggaran dari pusat yang memadai,” tukas Bowo meyakinkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, pihaknya sangat mengharapkan yang bisa meladeni mereka saat pertemuan adalah Pejabat Gubernur atau Sekretaris Daerah. Agar segala sesuatu yang dibicarakan dapat diambil keputusan secara cepat dan tegas, mengingat pertemuan tersebut jarang sekali terjadi.

“Ya, rekan rekan kecewalah, masa Sekda *enggak* datang,” ujar Fikri kepada pers se usai pertemuan bersama Pemprov Kepri yang diwakili oleh Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi dan Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak

Daerah (BP2AD) Kepri, Puji Astuti, Kamis (1/10) di Kepri.

Kendati demikian, kata Fikri, kekecewaan yang ada bukan kepada institusi, melainkan kepada problem yang terjadi di Kepri. Dia mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak sangat banyak, namun di Kepri seperti tidak ada kejadian.

“Kecewa lebih kepada problematika disini, sekarang seperti tidak punya problem, seperti tidak punya masalah, padahal Kepri ini menjadi wilayah fokus kami terhadap perlindungan anak,” ujar Fikri.

Kedatangan Komisi VIII ke Kepri ini untuk memperjuangkan agar anggaran upaya perlindungan anak daerah dapat tersentuh hingga ke Kepri. Selain itu, Komisi VIII DPR juga sebagai fasilitator membantu Provinsi Kepri mengentaskan permasalahan yang melibatkan anak.

“Makanya perlu kerja sama dan keseriusan pemerintah juga, harus ada kesadaran bahwa ini adalah darurat kekerasan terhadap anak, dan itu harus dilakukan semua elemen, bukan hanya aktifis saja,” pungkas Fikri lagi.

Usai pertemuan, malam itu juga rombongan Kunker Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI menyempatkan diri melihat langsung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) “Engku Puteri” Provinsi Kepri berlokasi di Jl. Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. (OJI) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR



Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto menilai meski Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan daerah untuk

IMPLEMETASI PERDA PERLINDUNGAN ANAK DI KALBAR MASIH DIPERTANYAKAN

memberikan perlindungan terhadap anak-anak, namun implementasinya masih dipertanyakan.

“Berbagai Perda dan program yang dibuat Pemprov Kalbar dalam melindungi anak Indonesia memang sangat baik, dan kami apresiasi itu, tapi bagaimana implementasinya di masyarakat? Tentu semua akan percuma jika tidak dilaksanakan berbagai peraturan tadi. Akibatnya angka kekerasan terhadap anak masih tinggi,” ujar Kus, begitu ia biasa disapa

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan selain implementasi Perda perlindungan anak yang masih belum terlihat di masyarakat, ia juga menilai belum adanya berbagai fasilitas

atau sarana dan prasarana ramah anak juga membuat kota dan Kabupaten di Kalbar belum dapat menjadi kota Layak Anak.

“Perangkat atau regulasinya sudah ada, tinggal implementasinya harus segera dilaksanakan. Disinilah diperlukan komitmen dan ketegasan dari seluruh pihak termasuk SKPD terkait, serta Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum terutama bagi pelaku kekerasan terhadap anak,” pungkasnya saat bertemu dengan Asisten III Sekda Kalbar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, keluarga berencana (BP3AKB) Kalbar, Beserta SKPD Kalbar, Kamis (1\10). (AYU) FOTO: AYU/PARLE/IW

KOMISI X DUKUNG KAWASAN MANDEH JADI PARIWISATA NASIONAL

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan akan mendukung rencana objek wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Jika usulan ini dapat diwujudkan, maka objek wisata Mandeh akan masuk dalam agenda pengembangan pariwisata

nasional, dan akan mendapatkan keringanan terutama anggaran,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Kamis (1/10).

Ia menambahkan, anggaran pengembangan pariwisata dengan dana besar akan menjadi tanggung jawab pusat.



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almayshari

Sementara bagian daerah hanya pada sektor penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar kawasan wisata.

Mandeh merupakan kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas langsung dengan

Kota Padang. Kawasan ini hanya berjarak 56 Km dari Padang dengan Luas ± 18.000 Ha dan waktu tempuh sekitar 56 menit. Kawasan Wisata Mandeh melingkupi 7 Kampung di 3 nagari yang dihuni oleh 9.931 jiwa penduduk dengan mata pencaharian bertani, beternak dan nelayan.

Objek wisata Kawasan Mandeh (Mandeh Resort) sudah dikenal baik tingkat nasional maupun Internasional dengan adanya investasi asing (Itali), mengembangkan resort wisata yang dikenal dengan Cubadak Paradiso. Bahkan Kawasan Mandeh telah menjadi destinasi utama kebijakan sector pariwisata kebaharian yang dimasukkan kedalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) bersama Biak dan Bunaken. Kawasan Wisata Mandeh sangat menjanjikan untuk dijadikan tujuan investasi.

Politisi PKS ini menambahkan, objek wisata Mandeh ini sangat berpotensi untuk menarik banyak wisatawan, maka dari itu harus bisa dikembangkan mulai dari infrastruktur dan SDM.

Kedua hal itu harus menjadi perhatian penting.

“Terutama pengembangan SDM warga di kawasan wisata Mandeh ini, merupakan hal yang fundamental sekali,” katanya.

Jika pengembangan fisik objek wisata sudah menjadi bagian pusat, maka kabupaten hanya fokus pada pengembangan SDM untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Sedangkan provinsi menyiapkan infrastruktur jalan akses ke kawasan tersebut. Kedua hal ini harus beriringan dan menjadi prioritas.

Sementara itu, PLH Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Erdison mengatakan, Pemkab akan mengembangkan dermaga di kawasan wisata Mandeh, untuk tempat kapal kecil atau sedang, bagi wisatawan dan juga penginapan.

Pemkab kata dia, juga akan mengembangkan SDM masyarakat lokal agar ikut berperan, sehingga bukan hanya investor luar yang mendapat peluang, tetapi warga setempat juga bisa mengembangkan potensi ekonominya.

(ANDRI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

Komisi III Minta Pengusutan Kasus Salim Kancil Tidak Hanya Kepada Kades Hariyono

Komisi III DPR RI meminta kepada Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji tidak menghentikan kasus pembunuhan dan penganiayaan ini hanya di Kepala Desa (Kades) Hariyono saja.

“Kami minta Kapolda Jatim untuk menelusuri pasir itu sampai dimana, pembelinya siapa, ditampung dimana,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman kepada wartawan disela-sela Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau langsung lokasi penambangan pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang, Jum’at (2/10/2015).

Dia meminta juga kepada Kapolda Jatim untuk dapat menelusuri siapa yang melindungi Kades tersebut, dan berapa jasanya.

Lebih lanjut, Benny meminta juga kepada kepolisian segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi saksi dan keluarga korban.

Pimpinan Komisi III DPR RI ini meyakini Kades Hariyono tidak bermain sendiri dalam penambangan pasir ilegal itu.

Di tempat terpisah Bupati Lumajang, As’at Malik mengatakan jika penambangan pasir Kades Hariyono di atas kawasan konsensi milik PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) untuk penambangan pasir besi (galian B). Namun, lanjutnya, sejak tahun 2014, IMMS tidak menambang lagi karena terbentur pada pelaksanaan UU Minerba. Ketika pasir laut itu tidak ditambang, Kades Hariyono menambang pasir dikawasan itu. Pasir yang ditambang masuk dalam jenis galian C.



Tim Komisi III DPR dipimpin Benny K Harman meninjau lokasi penambangan pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Lumajang

“Kami minta penambangan pasir ilegal itu ditutup, dan Kades Hariyono setuju, dan sudah membuat pernyataan. Namun ternyata penambangan dilakukan lagi,” ungkap Bupati Lumajang,

Sedangkan Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji mengatakan khusus untuk penambangan ilegal, polisi sudah menetapkan tersangka Kades Hariyono. (IWI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

KOMISI III MINTA KAPOLDA JATIM USUT TUNTAS KASUS LUMAJANG

Komisi III DPR RI meminta kepada Kapolda Provinsi Jawa Timur Irjen Anton Setiadji mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus illegal mining, penganiayaan terhadap Tosan dan kasus pembunuhan seorang petani Salim Kancil di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman kepada wartawan usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi III DPR dengan Kapolda Jatim, Bupati Lumajang, DPRD Lumajang dan Kapolres Lumajang, di Kantor Pemkab Lumajang, Jum'at (2/10'2015).

Hasil pertemuan tersebut, kata politisi Partai Demokrat ini bahwa Kapolda Jatim telah memberikan jaminan akan mengusut dan melakukan proses hukum secara tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan juga akan memberikan jaminan rasa aman kepada

warga masyarakat disekitar tempat kejadian peristiwa tersebut.

Dia menambahkan bahwa Kapolda Jatim juga akan menyerahkan sejumlah saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) untuk mendapatkan perlindungan apabila memang mereka membutuhkan.

"Ini temuan yang kami dapat dan Kapolda Jatim berjanji akan mengusut tuntas dan menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya," jelas Benny seraya menambahkan ini adalah jaminan beliau (Kapolda Jatim).

Selain itu, lanjutnya, Kapolda Jatim juga akan memberi jaminan akan mengusut sejumlah pihak yang diduga oknum-oknum aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus *illegal mining*, pungkasnya.

Sementara ditempat yang sama Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji dihadapan wartawan mengatakan siap mengusut tuntas peristiwa yang terjadi



Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat diwawancara wartawan

di Desa Selok Awar-Awar.

"Hari ini ada tambahan dua tersangka untuk *illegal mining*. Keduanya adalah teman Kades," ujar Anton.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim berjanji akan mengusut tuntas kasus penambangan liar, termasuk mencari tahu siapa saja orang yang diduga terlibat dalam kasus itu. "Kami nanti akan mendalami dalam penyidikan, termasuk apakah ada perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal ini," tegasnya. (IWI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

INDUSTRI PARIWISATA PENYUMBANG DEvisa TERBESAR



Anggota Komisi X DPR Elviana berdialog dengan salah seorang wisatawan mancanegara

Industri pariwisata merupakan komoditas yang produktif dan dipandang punya peranan penting dalam pembangunan nasional. Karenanya tidak mengherankan apabila Indonesia saat ini sedang gencar memajukan industri pariwisata. Sebab, sektor ini akan dijadikan sebagai penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Elviana dari fraksi PPP saat bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

"Sumatera Barat banyak mempunyai potensi pariwisata yang bagus. Ini yang harus dikembangkan dan harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dalam mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat tentu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan, Penerangan Jalan, Tempat Parkir, WC umum dan lain-lain sebagai penunjang pariwisata," ungkapnya Jumat di Padang, Sumbar.

Lanjutnya, yang menjadi harapan pemerintah pusat dalam pengembangan kepariwisataan di daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan de-

visa negara khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Haris Almansari mengatakan pengajuan proposal oleh Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan ke pemerintah pusat melalui Komisi X DPR RI akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Nilai proposal yang diajukan

sebesar Rp2 miliar untuk promosi akan dikordinasikan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif.

“Sekarang ada pengajuan proposal untuk promosi dari pemkab Pesisir Selatan. Komisi X akan men-support dan akan memperjuangkannya secara maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kawasan Wisata Mandeh akan menjadi kajian bagi DPR RI khususnya Komisi X untuk dikembangkan. Potensi wisata yang dimiliki kawasan ini sangat besar namun mem-

butuhkan perhatian serius.

Jika sudah berjalan dengan baik, maka pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Sumatra Barat akan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dan menjanjikan, karena kondisi alam, kondisi masyarakat yang mejemuk dan objek wisata Sumatra Barat sangat mendukung untuk dijadikan industri pariwisata daerah, regional bahkan internasional. (ANDRI)

FOTO:ANDRI/PARLE/IW

TOUR DE SINGKARAK JADI AJANG PROMOSI PARIWISATA SUMBAR

Tour de Singkarak (TdS) 2015 itu sangat positif diselenggarakan setiap tahunnya, karena melalui ajang itu banyak manfaat yang diperoleh, disamping akan menggenjot perekonomian masyarakat juga sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata Sumatra Barat kepada masyarakat internasional.

Tour de Singkarak (TdS) 2015 yang berlangsung 3 sampai 11 Oktober di Sumatera Barat akan diikuti 36 negara. Ajang balap sepeda internasional ini menempuh jarak sejauh 1.343,1 kilometer yang terbagi dalam sembilan etape serta melalui 18 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Abdul Kharis Alamsari berharap dengan banyaknya kesenian tradisional yang



Tim Komisi X DPR berdialog dengan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan

ditampilkan pada kegiatan tersebut hendaknya mampu memperkenalkan daerah itu ke tingkat internasional. Menurutnya, momen tersebut sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk mempromosikan daerah.

Lebih lanjut Kharis mengharapkan pemerintah dapat segera mengatasi masalah kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap. “Komisi X DPR harapkan kebakaran hutan bisa di padamkan, karena kabut asap meng-

ganggu acara Tour de Singkarak (TdS) 2015 juga pariwisata di Sumatra. Kita bisa lihat dilapangan dalam kunjungan kerja ke Sumatra Barat banyak pengelola wisata yang mengeluh kata mereka dalam sepekan ini banyak turis asing yang datang ke Sumbar mengeluhkan kabut asap tersebut”.

Untuk itu Komisi X DPR berharap acara Tour de Singkarak dapat berjalan dengan sukses dan juga gangguan asap bisa segera diatasi oleh pemerintah tegasnya. (ANDRI) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

Masih Ada Peluang Pembiayaan Stadion Barombong Masuk RAPBN 2016

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam memastikan pembiayaan untuk pembangunan Stadion Barombong di Makassar tidak masuk RAPBN 2016 yang diajukan Kemenpora. Namun demikian, masih ada peluang agar proyek pembangunan stadion ini memperoleh pembiayaan karena memang pengajuan anggaran tersebut masih masuk pagu sementara.

“Komisi X DPR bersama Menpora sudah membahas RAPBN

2016 dan dalam RAPBN tersebut, tidak dimasukkan anggaran untuk pembangunan stadion Barombong. Namun, masih pagu sementara, karena Menpora masih menginginkan anggaran tambahan, disinilah peluangnya, oleh karena itu kita minta Pemprov segera bersurat kepada Kemenpora agar ini bisa dimasukkan,” kata Ridwan dihadapan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Sekda Prov Sulses Abdul Latief, Kadispora, Koni di Aula Kantor Gubernur Sulsel, di

Makassar, Jumat, (2/10).

Ia menjelaskan, bahwa jika pihak Pemprov Sulsel telah bersurat ke pihak Kemenpora, maka dalam pengesahan RAPBN nantinya, anggaran untuk pembangunan stadion tersebut bisa diperjuangkan.

“Ini ada peluang masuk di anggaran tambahan yang diminta oleh Kemenpora, kalau ini ada maka teman-teman di Komisi X siap memperjuangkan,” ujarnya.



Tim Kunspek Komisi X DPR menuju lokasi Stadion Barombong, Sulsel

Senada dengan Ridwan, anggota Komisi DPR dari Fraksi Nasdem Yayuk Sri Rahayuningsih yang ikut dalam kunjungan mengatakan dirinya mendukung tambahan anggaran untuk pembangunan stadion Barombong, “Kami juga mohon usulan anggaran tersebut segera diajukan dan nanti akan kita (Komisi X DPR-red) perjuangkan,” terangnya

Namun, kata Yayuk, Pemprov juga harus bisa menjelaskan kepada DPR berapa sharing anggaran dari APBD dan yang bersumber dari APBN. “Karena nanti ketika Komisi X DPR akan perjuangkan, usulan tersebut sudah jelas,” tegasnya.

Hal senada di katakan oleh anggota tim Kunker Zulfadhli dari Fraksi Partai Golkar, bahwa masih ada waktu untuk mengusulkan tambahan anggaran ini, namun ia meminta agar diberikan gambaran yang jelas, rencananya berapa anggaran dari APBD tahun 2016

“Pembangunan stadion Barombong ini, sharing kan pak, APBD berapa, dari APBN berapa, dan sebenarnya stadion ini asset Provinsi Sulsel, dan pusat sebenarnya hanya penunjang saja, oleh karena itu, tidak mungkin pusat anggaran lebih besar dari APBD,” jelas Zulfadhli.

Dalam pertemuan ini, dirinya merasa heran kenapa sampai sekarang stadion Barombong yang dibangun sejak tahun 2011 belum selesai, padahal sudah dikunjungi oleh Wapres Jusuf Kalla, Kepala Bappenas, dan Menpora sekarang Komisi X DPR.

“Pejabat Negara sudah ada beberapa yang datang meninjau, rasanya aneh kalau sampai stadion ini tidak selesai-selesai, dan menurut saya ini mungkin hanya persoalan komunikasi saja,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah, Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan pihaknya akan segera bersurat kepada Kemenpora. “Sesuai dengan arahan dari komisi X ini, pekan depan kami akan segera berkirim surat,” terangnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel Syamsuddin Umar dalam laporannya menjelaskan kendala yang dihadapi didalam pembanguna Stadion Barombong adalah persoalan anggaran, dimana seperti diketahui bersama

bahwa stadion ini mulai dibangun sejak tahun anggara 2011 dan diproyeksikan selesai pada 2018.

“Pembangunan yang baru terserap, sampai tahun 2014 baru mencapai Rp.63.508 miliar lebih dengan realisasi fisik mencapai kurang lebih 20 persen,” jelas Syamsuddin.

ia menambahkan, pada tahun 2015 pembangunannya tetap dilanjutkan dengan sumber dana APBD Prov Sulsel sebesar Rp. 25 miliar sedangkan dari APBN belum ada.

Pembangunan Stadion Barombong sampai pada saat ini, jelas Syamsuddin pada dasarnya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam RPJMD 2013-2018 dengan skema porsi anggaran APBD dan APBN.

“Hal ini terkendala dengan masalah anggaran yang tersedia khususnya pada tahun 2015. Target realisasi fisik tahun 2015 diharapkan mencapai 40 persen dengan estimasi anggaran Rp. 50 miliar APBD dan Rp. 35 miliar dari APBN,” jelas Syamsuddin.

Namun, ujarnya karena keterbatasan anggaran sehingga alokasi anggaran dari APBD Prov Sulsel hanya 25 miliar.

Menurut Syamsuddin, pihaknya, telah berulang kali mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga agar memperoleh dukungan dana untuk pembangunan fasilitas ini.

“Kami juga sudah menunjukkan fasilitas ini kepada beberapa pejabat tinggi negara, seperti Kepala Bappenas yang saat itu masih dijabat oleh Andrinof Chaniago, bahkan Wapres Jusuf Kalla. Mereka memberi respons dan apresiasi yang baik, namun sampai saat ini anggarannya belum turun,” jelas dia.

Padahal, lanjutnya, pembangunan stadion berkapasitas 45 ribu orang tersebut sangat penting untuk kemajuan olahraga di Sulsel, karena memberikan ruang baik bagi masyarakat umum maupun klub-klub olahraga untuk beraktivitas.

“Fasilitas yang dimiliki rencananya semua berstandar internasional, sehingga bisa digunakan sebagai ajang pertandingan tingkat dunia,” tambahnya. (NT) FOTO: NITA/PARLE/IW

DPR SAYANGKAN MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI PROV. SULSEL

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR Ridwan Hisyam sangat menyayangkan minimnya sarana dan prasarana di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

“Saya sangat menyayangkan, karena Prov. Sulsel adalah salah satu pusat olahraga yang diharapkan di kawasan Indonesia Timur, kalau sampai tertinggal seperti ini bisa ketinggalan prestasi olahraga kita, khususnya di wilayah timur,” kata Ridwan usai melakukan pertemuan dengan Sekda Prov. Sulsel Abdul Latief, Kadispora dan Koni, di Makassar, Jumat, (2/10).

Sementara itu dalam laporan tertulisnya, Kadispora Prov. Sulawesi Selatan Syamsuddin Umar menerangkan, sarana dan prasarana latihan dan pertandingan selama ini banyak mengalami kendala karena fasilitas latihan yang digunakan sudah tidak representatif lagi.

“Secara umum sebagian besar sarana dan prasarana yang merupakan peninggalan ex PON IV tahun 1957 dan hanya sebagian kecil sarana dan prasarana yang dinilai layak yaitu GOR Suding Makassar dan mudah-mudahan pembangunan Stadion Barombong dapat segera diselesaikan,” jelas Syamsuddin.

Untuk dapat mensinergikan pembinaan olahraga dan prestasi di Sulsel yang selama ini merupakan kantong-kantong atlet berprestasi nasional dan internasional, tambahnya, maka sedapat mungkin pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sulsel untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan prestasi olahraga Indonesia.

“Pembangunan berbagai sarana olahraga di Sulsel telah tersedia lokasi yang cukup luas di area Kawasan Olahraga



Tim Kunspek Komisi X DPR melihat maket pembangunan stadion Barombong

Sudiang dengan luas sekitar 74 hektar, yang dapat dibangun beberapa fasilitas olahraga.

Tim kunjungan Komisi X DPR ke Provinsi Sulselsl diikuti juga oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra), Ismayatun (F-PDIP), Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Zulfadhli (F-PG), Sutan Adil Hendra (F-Gerindra), Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Sri Mellyana (F-Gerindra), Rinto Subekti (F-PD), Jefirstson R Riwu (F-PD), Laila Istiana (F-PAN), Yayuk Basuki (F-PAN), Nur Hasan Zaidi (F-PKS), Lathifah Shohib (F-PKB), Anwar Idris (F-PPP), Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem), dan Yayuk Sri Rahanuningsih (F-Nasdem). (NT) FOTO: NITA/PARLE/IW



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Kejahatan cyber adalah salah satu tantangan yang harus segera diatasi oleh Indonesia. Palsunya, hal itu dapat memberikan dampak buruk yang signifikan jika terjadi dalam skala besar.

TNI HARUS SIAP HADAPI PERANG CYBER

Kejahatan cyber menjadi tantangan Indonesia, karena kalau terjadi secara masif maka bisa terjadi kekacauan. Merujuk pada data trafik kejahatan cyber, membuktikan bahwa keamanan cyber Indonesia masih lemah.

Kejahatan cyber tentu tidak bisa lagi dianggap remeh oleh TNI, di usia 70 tahun TNI, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya berharap bahwa TNI harus siap menghadapi perang cyber.

“Di usianya yang ke-70, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang cyber. Perang jenis ini juga dapat mengancam kerukunan dan persatuan di Indonesia, di samping gerakan-gerakan ekstremis serta konflik horisontal,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya sebelum Rapat Paripurna DPR, Senin (05/10/2015).

Lebih lanjut, Tantowi mengatakan,

bahkan saat ini efek pilpres di media sosial masih tetap berlanjut, dimana mereka saling serang melalui media sosial.

“Ada proxy war, perang non-konvensional, perang tanpa senjata, perang melalui cyber. Ini, tujuannya juga memecah belah kerukunan bangsa Indonesia dalam rangka memperlemah kesatuan bangsa,” lanjut Tantowi.

Dalam perayaan 70 tahun TNI, Tantowi Yahya berharap TNI dapat menyelesaikan reformasi yang belum sepenuhnya selesai. Dari sektor legislasi, TNI belum membangun kesetaraan prajurit dengan rakyat biasa di depan hukum.

“Selama ini kalau ada tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI payung hukumnya militer. Ke depan, kalau TNI melakukan pidana, yang bersangkutan

harus merujuk ke pengadilan biasa,” tegas Tantowi Yahya.

“Dengan segala kelebihan dan kehebatannya kita harus acungkan jempol,

tapi ke depan masih ada pekerjaan yang belum selesai. Sesuai amanat UU TNI No. 34/2004 pasal 64 ayat (2) prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan

umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang,” pungkas Tantowi. (SKR), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.



Anggota DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo

Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap kebakaran hutan saat ini

PEMERINTAH SANGAT LAMBAT TANGANI KABUT ASAP

tidak sistematis, terkesan lambat. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, Pemerintah wajib menjamin pencegahan kerusakan hutan termasuk ekosistemnya dan pencegahan kekeringan di musim kemarau serta pemberantasan kerusakan hutan dan ekosistemnya, termasuk pencegahan kebakaran sesuai dengan UU no. 18 th 2013 yang merupakan tanggung jawab negara (Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah).

“Harusnya, bila pemerintah saat ini mengimplementasikan UU maka tidak akan terjadi hutan kering dan akhirnya terbakar seperti yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan di

Pulau Jawa ada sekitar 8 gunung hutannya terbakar termasuk milik PT. Perhutani (Persero),” kata Bambang Haryo.

Menurutnya, harus disadari bahwa kerugian kerusakan hutan dan ekosistemnya sangat besar termasuk gangguan kesehatan masyarakat dan kerugian perekonomian daerah bahkan nasional semakin besar di saat krisis ekonomi saat ini.

“Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan bencana asap ini secepatnya, kalau tidak malu sama gelar yang beliau punyai,” tegasnya. (ASI), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

ANGGOTA DPR DUKUNG PEMERINTAH TURUNKAN HARGA BBM

Anggota DPR RI Kurtubi dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) mendukung rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan posisi harga *crude* 50 USD per barels, dengan nilai kurs rupiah 15.000 per dolar, maka BPP BBM menjadi sekitar Rp6.600 per liter.

“Ada ruang untuk menurunkan harga BBM sebesar Rp1.000 per liter,” kata Kurtubi, Senin (10/5), di Gedung DPR.

Kurtubi yang juga anggota Komisi VII ini menilai, jika pemerintah menurunkan harga BBM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab harga BBM yang turun akan meningkatkan daya beli masyarakat, kendati di tengah kelesuan ekonomi dunia saat sekarang.

“Yang pasti akan meningkatkan konsumsi sekaligus pertumbuhan eko-

nomi. Dan yang jauh lebih penting lagi karena saat ini belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta *government spending* pemerintah sudah mulai cair,” terangnya.

Kurtubi melanjutkan, seiring dengan terus anjloknya harga minyak mentah dunia, yang bisa dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menurunkan BBM. Harga gas dan tarif listrik juga harus turun, karena batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD) juga sudah lama turun.

Menurutnya, jika ini dilakukan maka industri akan tumbuh lebih bagus dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2016 sudah bisa di atas 5 persen, dan bisa saja pertumbuhan 6



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

persen berpeluang. “Pertumbuhan ekonomi menembus 6 persen, mengapa tidak,” tuturnya. (ASI), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

Panitia kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi VIII mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam usaha perlindungan anak.

“Kami mengapresiasi langkah Pem-

KOMISI VIII APRESIASI KALBAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK

prov Kalbar dalam upaya perlindungan anak Indonesia di wilayahnya, diantaranya lewat Peraturan daerah Provinsi Kalbar, atau Pergub Kalbar No.4 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan masa depan anak-anak Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak saat memimpin rombongan Panja Perlindungan Anak, Kamis (1/10).

Selain itu menurut Deding, pembentukan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) Provinsi Kalbar, Komisi Perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID), P2TP2A (Pusat pelaya-

nan terpadu perempuan dan perlindungan anak) dimana ketiga badan dan lembaga itu bertugas meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak.

“Tentunya ketiga lembaga\badan, disertai seluruh *stake holder* terkait harus bekerjasama dan meningkatkan koordinasi dalam perlindungan anak Indonesia di wilayah Kalbar. Pasalnya angka kejahatan terhadap anak khususnya perdagangan anak menurut data dari International Organization for Migration, Provinsi Kalbar menduduki peringkat kedua terbesar se Indonesia setelah Jawa Barat,” tegas politisi dari Fraksi Golkar. [AYU]/FOTO:AYU/PARLE/IW.

NEGARA HARUS HADIR DI TENGAH MASYARAKAT PERBATASAN



Anggota Komisi VIII DPR M. Iqbal Romzi

Lebih baik air di negeri sendiri dari pada hujan emas di negeri orang. Begitulah gambaran yang menunjukkan nasionalisme masyarakat. Namun hal itu bukan berarti membiarkan masyarakat berada dalam keprihatinan, tanpa adanya perhatian. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, M. Iqbal Romzi dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu.

“Saya mendapat informasi kehidupan masyarakat di Kali-

mantan barat khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga sangat memprihatin, sarana pendidikan terbatas, dan kebutuhan hak anak pun menjadi tak terpenuhi, seperti tempat bermain yang ramah anak. Dan pada akhirnya anak pun tidak terlindungi secara utuh,” ungkap Iqbal.

Hal itu menjadi sangat ironis ketika masyarakat negara lain yang notabene tinggal di wilayah yang berdampingan dengan masyarakat Indonesia (perbatasan-red), memiliki tingkat kehidupan yang bertolak belakang.

“Kondisi tersebut tentu sangat menyedihkan, karena langsung terlihat perbedaannya dengan negara lain. Negara harus hadir disini, di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat perbatasan yang jelas-jelas menjadi sorotan internasional, dan bahkan disini-lah terletak harga diri bangsa di mata

internasional,” ujar Politisi dari Fraksi PKS ini,

Oleh karena itu Iqbal berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat perbatasan, baik sarana dan prasarana pendidikan, serta bidang lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin dengan perhatian yang lebih dari pemerintah nantinya, akan semakin menumbuhkan kecintaan dan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan kepada tanah air Indonesia. [AYU]/FOTO:AYU/PARLE/IW.



Anggota Komisi IV DPR RI, Sjachrani Mataja

Anggota Komisi IV DPR RI, Sjachrani Mataja menilai sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut perpanjangan moratorium kapal yang semula hanya sampai 30 April 2015 diperpanjang hingga 31 Oktober 2015. Perpanjangan moratorium ini dinilai menambah beban nelayan yang notabene merupakan masyarakat miskin. Bahkan hal itu juga dikeluhkan pengusaha penangkapan udang yang mengeluhkan moratorium tersebut.

“Jika perpanjangan moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan itu

PERPANJANGAN MORATORIUM SEBAIKNYA DICABUT

bertentangan dan menyengsarakan nelayan yang merupakan bagian dari rakyat miskin ya sebaiknya dicabut saja dulu moratorium itu, sambil pemerintah bersama dengan nelayan dan pengusaha penangkapan ikan dan udang mencari solusi atas segala permasalahan yang ada. Karena sejatinya peraturan dibuat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat,” jelas Sjachrani kepada Parlemen, baru-baru ini.

Perpanjangan masa berlaku moratorium kapal tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menteri KP sempat beralasan perpanjangan itu dilakukan karena masih butuh waktu lagi untuk verifikasi analisis dan evaluasi (anev) terhadap eks kapal asing yang dilakukan tim Satgas Anti *Illegal Fishing*. Sementara itu akibat dari moratorium itu tidak sedikit perusahaan penangkapan ikan dan udang yang sudah gulung tikar karena tidak beroperasi, hal itu tentu juga berpengaruh terhadap penghasilan nelayan-nelayan.

“Peraturan itu sebenarnya baik untuk memberantas illegal fishing, tapi jika penanganan ini terus berlarut juga tidak baik bagi kapal-kapal yang sebenarnya tidak terlibat *illegal fishing*. Hal itu tentu memperparah kondisi nelayan kita di tengah kondisi ekonomi bangsa yang tengah terpuruk ini,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini. (AYU) FOTO:

AYU/PARLE/HR

DPR Dorong Pemerintah Maksimalkan BOPTN

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua dalam membiayai anaknya di tingkat perguruan tinggi. Diharapkan, dana BOPTN juga dapat disalurkan secara merata dan berkeadilan. Untuk itu, DPR mendorong agar Pemerintah dapat memaksimalkan BOPTN.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, di sela-sela RDP antara Panja BOPTN Komisi X DPR dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Gedung Nusantara I, Senin (5/10/15).

“BOPTN ini menjadi salah satu indikator yang diharapkan oleh universitas dalam menunjang kegiatan operasional. Kita mendapat masukan dari para rektor dari seluruh Indonesia, yang selama ini merasa BOPTN belum berkeadilan. Saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kemenristekdikti, untuk melakukan kajian, rumusan, dan simulasi, yang betul-betul berkeadilan dalam penyaluran BOPTN ini,” harap Sutan.

Politikus yang akrab dipanggil SAH

ini menilai, rumusan atau formulasi dalam menentukan besaran BOPTN ini belum adil. Ia berharap, formulasi yang diusulkan oleh Kemenristekdikti, dapat mengakomodir keinginan perguruan tinggi (PT) yang mendapatkan BOPTN.

“Kita harus tahu betul, alokasi dasar daripada BOPTN itu berapa. Kita juga harus memahami betul jumlah mahasiswanya, tingkat akreditasi kampus tersebut. Ini semua memerlukan pemahaman dan adanya kesepakatan, untuk kita menyatukan pandangan agar akhirnya nanti semua PT yang memiliki badan hukum, dan juga perguruan tinggi swasta ini, mendapatkan keadilan,” papar politikus F-Gerindra itu.

SAH memastikan, pihaknya dengan Pemerintah akan segera memutuskan formulasi yang paling tepat, agar program BOPTN ini tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. “Karena salah satu solusi untuk mengurangi biaya perkuliahan mahasiswa dan meringankan orang tua adalah melalui BOPTN ini,” imbuhnya.

Namun, di satu sisi, politikus asal dapil Jambi ini menyayangkan penurunan besaran BOPTN di tahun men-



Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra

datang. Dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu operasional PT.

“Anggaran BOPTN untuk tahun 2016 mendatang, ada penurunan sekitar Rp 3,6 triliun. Karena ada penurunan anggaran ini, maka perlu kita cari solusi yang sangat-sangat adil, sehingga ini tidak mengganggu proses perkuliahan baik di PTN, maupun PTS,” janji SAH.

SAH juga menyoroti penyaluran BOPTN ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Peralnya, keterlambatan penyaluran ini dapat mengakibatkan imbas yang besar. Ia juga berharap, penyaluran dapat disebar secara merata, terutama untuk daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan. (SFI) FOTO: JAKA/PARLE/IW.



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani

Penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN tahun anggaran 2016 sudah disepakati Komisi VI DPR RI. Totalnya mencapai Rp34, 318 triliun untuk 23 BUMN. Dengan PMN kali ini, diharapkan, sejumlah BUMN mengutamakan penggunaan produk dan pekerja lokal.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (F-PG), Rabu (7/10). “BUMN harus menempatkan rekening PMN secara terpisah. Dengan penyaluran PMN ini,

Penyaluran PMN Harus Utamakan Produk dan Pekerja Lokal

rekrutmen pekerja lokal dan penggunaan produk lokal harus diutamakan. Harapannya tentu untuk memberikan keuntungan bagi negara. Tidak boleh ada kerugian.”

Ditegaskan politisi dari dapil Jateng V ini, dana PMN yang kelak akan disalurkan ke rekening BUMN, tak boleh digunakan untuk membayar utang. Dan pemerintah diimbau untuk tidak lagi menunda-nunda pencairan PMN seperti pada PMN 2015. Beberapa BUMN seperti Bulog, Shang Hyang Seri, dan Pertani belum menerima pencairan PMN 2015.

Shang Hyang Seri, misalnya, pada PMN 2015 disepakati mendapat Rp400 miliar. Tapi hingga kini belum dicairkan. Padahal tugasnya penting untuk ikut serta mendukung kedaulatan pangan nasional. Namun, tahun 2016 Shang Hyang Seri tidak mendapat PMN karena persoalan internal, sehingga alokasi PMN-nya diberikan kepada PT. Pertani

sebesar Rp250 miliar.

“Itu saya minta dengan sangat Kementerian BUMN bisa memprioritaskan penyaluran PMN untuk BUMN yang belum menerima. Tidak boleh tersendat lagi penyalurannya,” ujar Endang. Ditambahkannya, keberadaan BUMN penting sebagai PR negara dalam urusan bisnis. Apalagi pemberlakuan MEA tinggal menghitung hari. Negara ini akan banyak banjir produk-produk asing.

Negara harus sudah siap menghadapi persaingan ekonomi di tingkat regional. Indonesia, kata Endang, harus bangkit. Dan beberapa BUMN yang mendapat PMN tersebut menjadi tumpuan negara di garda terdepan untuk menghadapi persaingan itu. BUMN juga harus mampu menyukseskan program-program pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah ingin membangun kedaulatan energi dan pangan lewat peran BUMN.

(MH)/FOTO:ANDRI/PARLE/HR

LPKA FOKUS PERBAIKI MENTAL ANAK



Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati saat meninjau LPKA di Batam

Pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertujuan memulihkan mental anak yang tersangkut masalah hukum. Demikian salah satu paparan anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati saat Kunjungan Kerja Panja Perlindungan Anak ke LPKA Kelas II B Batam, baru-baru ini.

Menurut politisi PDI-P tersebut, masalah psikologi atau perbaikan mental Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus menjadi perhatian bersama, karena itu LPKA harus

menjadi tempat tinggal yang layak bagi anak. Selain itu sistem yang diterapkan terhadap warga binaan anak harus dibedakan dengan warga binaan dewasa.

“Harus dipikirkan dampak psikologis jika tahanan anak dititipkan di Rutan Dewasa selama 2 bulan masa renovasi LPKA, karena yang dewasa lebih fokus untuk keamanannya, sedangkan untuk anak-anak yang difokuskan adalah penunjang bagi mental mereka,” ujar Itet.

Hal senada diungkapkan Desy Ratnasari, anggota Komisi VIII DPR Dapil Jawa Barat ini juga turut prihatin jika penanganan masalah psikologi anak belum maksimal bahkan kurang tersentuh.

Politisi PAN ini mengusulkan agar pihak LPKA melakukan kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki jurusan psikologi untuk membantu proses rehabilitasi mental anak-anak yang tersangkut masalah hukum.

“Kalapas harus berinisiatif melibatkan institusi pendidikan di Batam yang memiliki jurusan psikologi untuk membantu perbaikan mental anak berhadapan dengan hukum,” saran Desy.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan LPKA merupakan Lembaga Pembinaan Anak dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang harus bersinergi dengan Kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan.

“Jadi pendidikan anak juga harus tetap terpenuhi meskipun hak gerak mereka dibatasi. Kesehatan anak juga harus diprioritaskan sehingga semua harus bersinergi,” terang Fikri.

Kunjungan Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan rutan khusus anak pertama di Kepri yang belum lama diresmikan namun harus lebih dahulu direnovasi mengubah rutan dewasa menjadi khusus anak.

Dari laporan yang diterima Komisi VIII DPR, anggaran yang dikucurkan senilai 1,4 Miliar. Hal tersebut belum memadai untuk penunjang rutan seluas 8000 meter persegi. Termasuk bangunan baik ruang pendidikan, taman bermain, perpustakaan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Kepala LPKA Kelas IIB Batam, Ammam Saifulhaq, mengakui adanya hambatan dan keterbatasan dana serta masalah renovasi yang menjadi sorotan utama Komisi VIII DPR. Karena anggaran yang minim maka langkah yang ditempuh adalah

merenovasi bekas rutan bagi tahanan dewasa menjadi konsep LPKA.

“Untuk LPKA ini sarana penunjang untuk anak yang mesti dimaksimalkan. Bukan hanya segi keamanan saja tapi juga sarana pendidikan, olahraga, perpustakaan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tuturnya.

Mengenai tahanan anak yang ditiptikan di Lapas Bareleng Batam, Ammam menjamin maksimal hanya 2 bulan selama masa renovasi dan mereka berada terpisah di sel khusus anak.

“Kebutuhan psikolog cukup mendesak tapi kampus-kampus di Batam belum ada yang memiliki jurusan psikologi, minat masyarakat bekerja di Lapas masih minim, sementara peningkatan kompetensi SDM terkendala moratorium PNS oleh Kemen PAN RB,” pungkas Ammam. (OJI)/FOTO:NAEFUODJI/PARLE/IW.

TNI HARUS LEBIH DICINTAI, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA

Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir menilai upacara peringatan HUT TNI ke-70 di Cilegon, Provinsi Banten dilaksanakan dengan konsep yang berbeda. Ia mengapresiasi Panglima TNI yang telah memutuskan pengaturan panggung lebih memberikan ruang kepada rakyat yang ingin mengikuti jalannya upacara. Baginya kebijakan itu selaras dengan tema ‘Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian’.

“Menarik menyaksikan pengaturan panggung dimana rakyat dan perwira dapat berbaur dan duduk bersama memperingati ulang tahun TNI. Bahkan banyak diantara perwira dan tamu undangan justru tidak kebagian tempat duduk, berpanas-panasan, sementara rakyat menempati panggung utama yang teduh dan nyaman,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/15).

Terkait tantangan ke depan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai penting bagi TNI untuk membangun kemandirian alutsistanya sehingga dapat menjadikan NKRI semakin kokoh, lebih disegani, lebih bermartabat dan berwibawa di mata internasional.

Pemenuhan alutsista sesuai standar yang memenuhi kebutuhan pokok minimum atau *Minimum Essential Forces* (MEF). Program pemenuhan MEF adalah program yang telah dicanangkan Presiden SBY sejak tahun 2005



Anggota Komisi I DPR Darizal Basir

yang terdiri dari beberapa renstra. Saat ini MEF telah memasuki renstra tahap ketiga dan sudah lebih separuh jalan.

“Kebijakan program pemenuhan MEF ini wajib kita lanjutkan karena akan menjadikan TNI memiliki efek *deterrent* dan disegani pihak lain. Harus diingat keberhasilan dalam dunia diplomasi juga sangat ditentukan oleh kekuatan militer,” ujar lulusan AKABRI angkatan tahun 1973 ini.

Tuntutan lain bagi profesionalisme TNI adalah persoalan kesejahteraan. Darizal meminta agar pemerintah meningkatkan dana-dana operasional maupun tugas TNI lainnya, serta juga tambahan bagi uang lauk pauk. Perhatian yang besar dari negara kepada para prajurit akan memompa semangat

prajurit dalam membela dan mempertahankan NKRI serta menjauhkan mereka dari kegiatan-kegiatan bisnis ilegal seperti beking usaha gelap dan melanggar hukum.

“Prioritas perhatian harus diberikan kepada para prajurit yang tengah menjalankan tugasnya jauh disana di wilayah terdepan dan terpencil”, sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini.

Demikian juga untuk perumahan. Masih banyak prajurit yang rumahnya *ngontrak* atau masih *nebeng* ke orang tua dan lokasinya sangat jauh dari markas. Pembangunan rumah dinas bagi TNI sangat penting karena ketika terjadi keadaan mendesak atau tugas dadakan, prajurit dapat dengan mudah dimobilisasi.

Tidak kalah penting menurutnya profesionalisme juga harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia. Ia meminta pemerintah memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi para prajurit untuk meningkatkan *skill* dan *knowledgenya* melalui beragam pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri serta melengkapi sarana prasarana pendidikan yang ada di dalam negeri.

“Sehebat apapun alutsista, jika *usernya* tidak memiliki kualifikasi yang baik maka akan sia-sia. Bukan senjatanya, tapi orang di belakang senjata”, tegas Darizal. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

DIAPRESIASI, LANGKAH BNP2TKI BERDAYAKAN TKI PURNA

Langkah Kepala BNP2TKI yang memberdayakan para TKI purna kerja dengan memberi modal usaha sangat diapresiasi. Pemberdayaan juga diberikan kepada para TKI yang dipulangkan ke Tanah air karena kasus hukum dan *over stay*.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (F-PPP) mengapresiasi langkah yang dilakukan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI. Beberapa waktu lalu Nusron membagikan tabungan kepada para mantan TKI untuk berwirausaha sekaligus membuka lapangan kerja di desanya masing-masing.

Lewat sambutan telepon, Rabu (7/10), Okky mengatakan, akses modal sangat dibutuhkan bagi para mantan TKI. Akses modal itu bisa juga dari penyuluran kredit usaha rakyat (KUR). Butuh pendampingan, pelatihan, dan pengawasan dari BNP2TKI selama para mantan TKI itu membangun usahanya. "Ini langkah yang baik dari BNP2TKI," nilai Okky.

Apresiasi juga disampaikan Okky untuk Nusron yang ingin



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

melakukan banyak perubahan dalam mensejahterakan para TKI. Misalnya, kata Okky, soal keberangkatan TKI ke luar negeri, akan dipersingkat menjadi rata-rata satu bulan dari yang sebelumnya bisa berbulan-bulan. Kemudian, pemotongan gaji hanya dua bulan untuk biaya pelatihan selama di Tanah Air dan pengurusan administrasi.

Belum lagi soal aturan remitansi (jumlah kiriman uang ke Indonesia dari para TKI) yang selama ini banyak dikirim lewat jalur tidak formal. Langkah Nusron yang terus ingin mengawasi dan mendeteksi devisa negara lewat remitansi ini juga dinilai langkah yang

baik. Okky menyebut bahwa Nusron menargetkan remitansinya menjadi tiga kali lipat dari sebelumnya.

Seperti diketahui, ada sekitar 6 juta TKI di luar negeri yang berkontribusi memberikan remitansi sebesar 8,4 miliar dolar AS atau Rp114 triliun tiap tahun. Nilai itu sudah separuh dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. (MHI/FOTO: JAKA/

PARLE/IW.

RUU Paten untuk Lindungi Hak Karya Intelektual



Ketua Pansus RUU Hak Paten John Kennedy Aziz dalam dialog Forum Legislasi

Ketua Pansus RUU Hak Paten John Kennedy Aziz menegaskan jika hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara, sehingga makin

banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya, karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor perekonomian masyarakat. Termasuk

usaha kecil dan menengah (UKM). Hanya saja kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak paten tersebut masih rendah.

"Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara. Seperti negara-negara maju yang setiap tahunnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknologi yang dihasilkan," tegas John Kennedy Aziz dalam diskusi forum legislasi 'RUU Hak Paten' bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Razilu, dan pakar ekonomi UI, Telisa Aulia Falianti di Presroom DPR, Gedung Nusantara III, Selasa (6/10/15).

Karena itu politisi F-PG itu berharap Indonesia terus mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indikator, peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal.

"Jadi, DPR berkomitmen akan pen-

tingnya hak paten ini untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya.

Politikus asal dapil Sumatera Barat itu menyadari kalau kecilnya hak paten di Indonesia ini akibat kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat rendah, pemerintah belum memberikan kemudahan untuk memperoleh hak paten, dan prosesnya bisa selama 48 bulan.

“Itulah yang mendorong lemahnya pendaftaran hak paten. Selain itu tidak ada timbal-balik atau *reward* bagi inventor. Sementara pemegang paten sudah dibebani biaya pemeliharaan dan perlindungan,” ujar Anggota Bamus DPR itu.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Razilu menegaskan jika RUU Hak Paten ini bukan UU baru, karena sejak masa Belanda sudah ada (1891) di mana Indonesia harus mendaftar ke Belanda kalau mau memiliki hak paten. Kemudian UU itu mengalami beberapa kali revisi (1989, 1991, dan 1997 dan 2001) sesuai perkembangan ma-

syarakat dan 2015 ini.

“Dalam revisi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain berpihak kepada inventor termasuk PNS (pegawai negeri sipil) dan UKM, memberi kemudahan pada masyarakat untuk memohonkan hak paten secara *online*, mendukung pembagian keuntungan (*benefit*) yang adil,” tegas Razilu.

Perlu diketahui hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

“Jadi, yang dipatenkan adalah terkait MIPA (matematika dan ilmu pengetahuan alam). Tapi, bukan ilmu sosial politik, ekonomi, agama, budaya,” katanya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

“Sanksinya, bukan saja sanksi perdata tapi juga pidana. Karena itu tingkatkan

peniruan dan hentikan pemalsuan,” pungkasnya.

Sementara, Pakar ekonomi dari UI, Telisa Falianti berharap dengan UU Paten ini jangan sampai terjadi monopoli perusahaan-perusahaan besar dan mengorbankan UKM, karena pemegang hak paten mendapat keuntungan besar dalam perekonomian nasional. Mengingat 90 % UKM itu mampu menyerap tenaga kerja nasional.

“Jadi, jangan juga *fee*, sistem pembayaran pendaftaran juga menjadi kendala bagi UKM untuk mendaftarkan hak patennya,” tegas Telisa

Selain itu lanjut Telisa, UU Paten ini harus menjadi inovasi dan sederhana. Seperti di China dan Indonesia sama dengan China, penduduknya sama-sama besar, negara kepulauan yang besar, dan kita hanya baru belajar dan masih *copast*.

“Pada prinsipnya jangan korbakan UKM, tidak ada monopoli dan sanksi yang berat, karena sanksi itu menunjukkan kepetuhan terhadap hukum,” pungkasnya. (INT,SC,SF)/FOTO:DENUS/PARLE/IW.

ASPIRASI DAERAH HARUS DIAKOMODIR DALAM PENYUSUNAN RUU



Ketua Tim Kunker Baleg DPR RI Totok Daryanto didampingi Wagub Jateng Heru Sudjatmoko

Badan Legislasi DPR memastikan, harus tercipta komunikasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyusunan Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) Prioritas 2016. Selain itu, aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU, harus diakomodir, sehingga ter-

wujud Undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto (F-PAN), saat mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Ketua DPRD, Kajati dan Perwakilan Pangdan, Kapolda, Kanwil Hukum dan

HAM, civitas Akademika Universitas Diponegoro dan Universitas 17 Agustus 1945, Organisasi profesi, LBH Dan LSM seluruh Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rabu (07/10/15).

“Penetapan *prolegnas*, terutama *Prolegnas* Prioritas tahun 2016, yang harus ditetapkan sebelum penetapan APBN pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan, sehingga kami harus menetapkan *Prolegnas* Prioritas pada waktu sebelum penetapan APBN yang waktunya ditentukan melalui Rapat Pimpinan Baleg untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno Baleg,” kata Totok, politikus asal dapil Jawa Timur V itu.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan) mengatakan, belum tercapainya realisasi penyelesaian RUU di DPR bukan semata-mata karena peran DPR saja, tetapi juga pemerintah. ada beberapa RUU yang terkatung-katung lama tidak selesai, misalnya RUU Penyiaran.

“Penyelesaian satu UU buka hanya menjadi wilayah DPR RI saja, tetapi ada

peran Pemerintah, sekitar 50 persen di dalam pembahasan RUU. Sering muncul salah persepsi seakan UU terkatung-katung, bahkan tidak selesai itu kesalahan DPR RI. Padahal sering sekali yang terjadi sebaliknya, pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atau sengaja memperlambat,” tegas politikus asal dapil Jawa Timur itu.

Penyerapan aspirasi ke Jawa Tengah ini mendapat apresiasi dari Wagub Jateng Heru Sudjatmono. Ia menyatakan, ini merupakan kesempatan baik yang diberikan kepada Pemprov untuk menyampaikan pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi atau masalah-masalah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan,

“Saya berharap bisa memberikan partisipasi yang sebaik-baiknya. Ini suatu kehormatan dan bisa dijadikan kesempatan,” kata Wagub Jateng.

Dalam sesi diskusi, Ketua KPID Jateng memberikan masukan terkait peran penting KPID, mengingat akhlak dan budi pekerti bangsa yang semakin runtu. Pasalnya, pembentuk watak selalu didasarkan kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi.

“Dampak dari televisi ini sangat berpengaruh sekali, mempengaruhi segala aspek watak dan perilaku masyarakat kita,” kata Ketua KPID Jateng.

Ketua KPID Jateng menambahkan, saat ini wewenang KPID saat ini masih sangat minim, karena hanya dapat memberikan sanksi dan teguran dari

lembaga penyiaran, khususnya televisi. KPID tidak bisa berbuat banyak kalau lembaga penyiaran televisi itu melakukan pelanggaran atau kesalahan besar.

“Kita tidak bisa serta merta langsung mengeksekusi, kami berharap agar pada saat revisi itu nanti tetap mementingkan kepentingan publik, untuk mewujudkan penyiaran yang demokratis. Bukan wewenang regulator penyiaran baik KPI, KPID, maupun Kemenkominfo, ini perbedaannya harus jelas,” papar Ketua KPID Jateng.

Masukan berikutnya, terkait periodisasi KPID dan hubungan antara KPI dan KPID. Selama ini belum tercipta sinkronisasi kewenangan secara kelembagaan antara KPI dan KPID. (HR,SF)

FOTO: EKA HINDRA/PARLE/HR

DPR Desak Pemerintah Serious Tangani Kabut Asap

Kabut asap akibat dari kebakaran hutan di sejumlah daerah seperti di wilayah Sumatera tepatnya di Pekanbaru, Jambi dan sebagian wilayah Kalimantan, semakin pekat, bahkan membuat perekonomian di Pekanbaru lumpuh serta anak-anak tidak bisa bersekolah karena diliburkan.

Terkait dengan hal ini, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dari fraksi partai Gerindra, mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah tegas dan konkrit terkait dengan kabut asap yang semakin membahayakan masyarakat.

“Masalah kabut asap ini sudah terjadi selama tiga bulan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil, bahkan kabut asap semakin pekat. Untuk itu Komisi IV DPR meminta agar Presiden mengambil alih masalah kabut asap ini,” ujar Edhy dalam keterangan persnya di ruang wartawan DPR Rabu (07/10/2015).

Edhy yang didampingi oleh Wakil Ketua Titiek Soeharto, Herman Khaeron dan Andi Akmal ini juga menuturkan, bahwa Komisi IV DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.

“Pemerintah harus menambah anggaran untuk mengatasi kebakaran hutan yang semakin parah, dan jangan menunggu keajaiban dari alam dengan menunggu turunnya hujan, tanpa melakukan langkah-langkah yang konkrit untuk menghen-



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

tiken kabut asap ini,” jelas Edhy.

Lebih lanjut Edhy menjelaskan, Presiden seharusnya memanggil bupati yang daerahnya terkena kabut asap, karena selama ini, belum terlihat Presiden memanggil bupati-bupati untuk membahas masalah kabut asap ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menetapkan kabut asap ini sebagai bencana nasional, dan jangan saling menuding dan menyalahkan akibat dari kabut asap ini.

“Komisi IV meminta kepada pemerintah untuk menetapkan kabut asap ini menjadi bencana nasional, agar seluruh komponen bangsa ini bersama-sama bekerja untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Dengan demikian masyarakat yang terkena kabut asap ini bisa terbebas dari musibah ini,” cetus Herman.

Hal senada juga dikatakan Titiek Soeharto yang berharap agar pemerintah Indonesia menerima saja bantuan dari negara-negara tetangga yang ingin membantu untuk memadamkan kebakaran hutan, karena dampaknya juga mengganggu negara-negara tersebut.

“Kebakaran hutan ini bukan tahun ini saja terjadi namun setiap tahun. Akibatnya masyarakat di beberapa daerah menjadi korban, karena itu jangan saling menyalahkan. Apabila Indonesia belum sanggup untuk memadamkan kebakaran hutan ini, jangan ragu untuk menerima bantuan negara lain,” tegasnya. (AS) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

BALEG DPR BELUM SEPAKATI USULAN REVISI UU KPK



Pimpinan Baleg DPR RI

Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI (Baleg) dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly belum menyepakati usulan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Nasional untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2015.

Rapat Kerja Baleg yang dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono belum menyepakati usulan tersebut, pasalnya masih ada perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi yang ada, karena memang kedua usulan tersebut baru diketahui saat disebarnya undangan rapat.

Menurut Sareh, Rapat Kerja Baleg tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya usulan anggota dewan di fraksi-fraksi tentang revisi UU KPK. "Menindaklanjuti adanya usulan dari beberapa anggota lintas fraksi kepada Baleg terkait dengan perubahan RUU tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang semula disulkan pemerintah menjadi usulan DPR," ujar Sareh di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2015)

la menginformasikan bahwa jumlah anggota pengusul penggunaan hak inisiatif DPR atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 45 anggota dewan. Jumlah pengusul paling banyak berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 15 orang. Kemudian disusul Fraksi Nasdem

11 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi PPP 5 orang, Fraksi Hanura 3 orang, dan Fraksi PKB 2 orang.

Dalam rapat tersebut, tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan yakni Rieke Diah Pitaloka, Henry Yosodiningrat dan Hendrawan Supratikno menyatakan dukungannya terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Rieke berpendapat bahwa revisi tersebut bukan sebagai langkah pelemahan KPK melainkan dalam rangka penguatan KPK. Sebab menurutnya tidak ada alasan untuk tidak mendukung revisi tersebut agar terdapat kepastian dalam pemberantasan korupsi. "Saya dukung untuk memperkuat UU KPK. Pembahasan akan terbuka. Harus dipastikan apakah pemerintah juga punya komitmen yang sama, atau membiarkan keagaduhan politik," ujar Rieke.

Sedangkan Hendrawan menilai pemberantasan korupsi tetap harus diberi masukan. Sebab, menurutnya revisi UU KPK ini bisa menjadi bola panas dan bola liar. Berdasarkan pengalamannya, dari perhitungan waktu lebih cepat inisiatif DPR karena daftar inventaris masalah pemerintah tunggal, sedangkan dari parlemen meski berbeda tiap fraksi, namun bisa di harmonisasi di rapat badan legislatif. "Kita harus bisa egaliter, transparan terbuka dan akuntable, terkait cara pemberantasan korupsi harus kita beri masukan," ujar Hendrawan.

Sementara menurut Henry alasan pertama dalam revisi UU KPK adalah

bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Henry menjelaskan kondisi masyarakat tahun 2002 berbeda dengan saat ini. Ia pun menilai dalam perjalanannya banyak ditemukan hal yang tidak sejalan dengan semangat saat KPK dibentuk.

Selain itu, ia menegaskan tidak ada upaya untuk pelemahan terhadap KPK. Sehingga ia pun berharap agar masyarakat umum untuk tidak mudah mengatakan bahwa pihak yang ingin merevisi mengatakan pelemahan. KPK. "Tidak ada keinginan lemahkan KPK, ini merupakan upaya kita membangun sistem ideal. Memperkuat lembaga KPK," kata Henry.

Berbeda dengan Rieke, Hendrawan dan Henry, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Martin hutabarat mengungkapkan keprihatinannya terhadap revisi UU KPK ini. Ia menilai persoalan revisi ini adalah masalah lama. Ia meminta agar tidak ada lagi upaya untuk mempreteli kewenangan KPK. "Kewenangan KPK jangan dipreteli, karena ini amanat reformasi," kata Martin.

Sementara, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Jefirtson Riwo Kore mengaku heran. Sebab revisi UU KPK menurutnya sudah disepakati akan masuk prolegnas prioritas pada tahun 2016. Namun, saat ini usulan revisi itu kembali menyeruak di tahun 2015. "Kenapa dipaksakan? Ini akan jadi preseden buruk. Sudah hampir selesai prolegnas. Apakah ada hubungannya dengan Komisi III yang memilih capim KPK?", ungkap Jefri.

Sedangkan, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf menilai revisi UU KPK sebaiknya tetap menjadi inisiatif pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat akan lebih menerima revisi UU KPK jika diusulkan oleh pemerintah. "Di tengah kondisi seperti ini kita mengajukan dengan perbedaan cara pandang yang luar biasa bedanya dari berbagai fraksi dan di tengah ketidakpercayaan publik kepada DPR. Jadi lebih bijak dari jalur pemerintah," ujar Muzamil. (SC)

FOTO:ANDRI/PARLE/IW.



Tim Kunjungan Lapangan Komisi III DPR RI dipimpin Benny K. Harman meninjau Tambang Pasir Desa Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Jumat (02/10) Foto : Iwan Armanias/Parle/IW



Tim Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI saat mengunjungi LPKA di Batam, Jumat (02/10). Foto : Naefuroji/ Parle/IW



Ketua Tim Kunker Baleg DPR RI Totok Daryanto saat berdialog dengan Wagub Jateng dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016, Kamis (07/10) Foto : Eka Hindra/ Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisjam meninjau tersendatnya Pembangunan Stadion Barombong (kiri) dan terbengkalainya pembangunan GOR Unhas, Jumat (02/10). Foto : Nita/ Parle/IW

